BAB IV

PENUTUP

1.7 Kesimpulan

- Pemerintah mengatur mengenai Perseroan Perorangan ini untuk meningkatkan kemudahan berusaha serta daya saing perorangan. Dengan adanya Perseroan Perorangan ini, maka pengusaha dapat mendirikan badan hukum dengan persyaratan yang relatif mudah dan cepat, serta dengan modal yang terjangkau.
- Sesuai dengan UUJN, maka direktur Perseroan Perorangan yang berusia 17 tahun tidak cakap untuk menjadi penghadap Notaris meskipun sesuai dengan PP Nomor 8 Tahun 2021 telah dianggap cakap untuk menjabat sebagai direktur. Hal ini menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum ketika direktur Perseroan Perorangan tersebut perlu untuk membuat akta otentik.

1.8 Saran

- Sebaiknya pemerintah melakukan sosialisasi lebih luas lagi kepada masyarakat agar dapat lebih memahami mengenai Perseroan Perorangan agar dapat meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat Indonesia.
- Sebaiknya pemerintah dapat mempertimbangkan mengenai perbedaan parameter kecakapan yang ada dalam hukum positif di Indonesia, agar tidak terjadi keraguan dan menyebabkan ketidakpastian hukum.